

**PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP POLA PENGELUARAN
RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**
Skripsi

Oleh

Eka Prianti



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICY RASKIN IN SPENDING PATTERNS RECEPIENT OF HOUSEHOLD AT BANDAR LAMPUNG CITY

EkaPrianti

This research aims to analyze the role of Raskin (poor rice) policy toward household expenditure pattern and household response toward the policy of Raskin food card replacement in Bandar Lampung City. The number of respondents in this research were 137 respondents that were determined by accidental sampling method. The data was analyzed by descriptive analysis, different test and cross tabulation. The results showed that there was reduction of household expenditure burden for grain after receiving Raskin subsidy that was equal to 4.69 percent. There was consumption escalation of vegetable protein sources (1%), animal protein sources (2.22%) and fruit (1%) of households in Bandar Lampung City after receiving Raskin subsidy. Household non-food expenditures, such as household needs, of clothing, housing and telecommunications increased by less than 1 percent. The factors that affected household responses in Bandar Lampung City to food card policy was the number of dependents and income, while the age and education of respondents did not affect the response of households in Bandar Lampung to Raskin card policy.

Key words :expenditure pattern, food card, raskin,

ABSTRAK

PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGADI KOTA BANDAR LAMPUNG

EkaPrianti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga dan respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan pengganti raskin di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan pada Bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *systematic random sampling*. Jumlah responden sebanyak 137 rumah tangga. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, Uji beda dan tabulasi silang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi pengurangan beban pengeluaran padi-padian rumah tangga setelah menerima subsidi Raskin yaitu sebesar 4.69 %. Terjadi peningkatan konsumsi sumber protein nabati (1%), sumber protein hewani (2,22%) dan buah-buahan (1%) rumah tangga di Kota Bandar Lampung setelah menerima subsidi Raskin. Pengeluaran non pangan rumah tangga, seperti kebutuhan kesehatan, sandang, perumahan dan telekomunikasi yang hanya meningkat kurang dari 1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon rumah tangga di Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan kartu pangan adalah jumlah tanggungan dan pendapatan, sedangkan usia dan pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap respon rumah tangga di Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan kartu Raskin

Kata kunci: kartu pangan, pola pengeluaran, Raskin,

**PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP POLA PENGELUARAN
RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Eka Prianti

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP
POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Eka Prianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1214131032**

Jurusan : **Agribisnis**

Fakultas : **Pertanian**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.
NIP 196308271986031003

Ir. Adia Nugraha, M.S.
NIP 196206131986031022

2. Ketua Jurusan / Program Studi

Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwati, M.P.
NIP 19630203 198902 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc



Sekretaris : Ir. Adia Nugraha, M.S.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Arwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP-19611020 196803 1 002

Tanggal Ujian Skripsi : 4 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukoharjo, 3 Januari 1995 dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Samini. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Keputran tahun 2006, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Islamiyah Sukoharjo tahun 2009, dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu tahun 2012. Penulis diterima di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Adi Luhur Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2015. Selanjutnya, pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2015, penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di PT. Momenta Agrikultura, Lembang, Bandung Provinsi Jawa Barat selama 30 hari kerja efektif.

Selama masa perkuliahan, penulis menjadi Asisten Dosen (Asdos) mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian semester ganjil tahun ajaran 2016. Penulis menjadi peserta/penyaji dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2016.

Penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) sebagai Sekretaris Bidang Media Center Fosi FP periode kepengurusan

2014/2015, Sekretaris Departement Media Center Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Birohmah Unila periode 2015/2016, Sekretaris Menteri Koordinator Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila 2016, dan sebagai anggota bidang Akademik dan profesi di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEPERTA) pada periode 2012 hingga tahun 2017.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah, Muhammad SAW, semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa berada di jalan Allah. Banyak pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan nasihat serta selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kebijakan Raskin Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”**. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Prof. Bustanul Arifin, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- (2) Ir. Adia Nugraha, M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- (3) Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan untuk kebaikan skripsi ini
- (4) Ibu Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwati, M. S., selaku Ketua Jurusan Agribisnis.
- (5) Ir. Eka Kasymir, M.S. selaku dosen Pembimbing Akademik.
- (6) Orangtuaku, Bapak Suparno dan Ibu Samini serta adiku, Sahrul Muanam tersayang yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat,

- (7) Sahabat-sahabat tersayang : Rofiiqoh Al-Khoiriah, Dewi Nurul, Arina Budiati, Indah Ayu, Hardini Tristya, Aldila Putri, Lindasoina yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- (8) Sahabat-sahabat terbaik : Riska Aprilia, Mei Listiarini dan Winda Aris Maya yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- (9) Saudari-Saudariku Akhwat Kece : Maya Puspita Sari, Eka Rani Saputri, Erni Rohasti, Ulpah Choirunnisa, Annisa Parastry yang menemaniku berjuang serta Jean Pitaloka, Devi Sabarina, Aanisah, Lina Nurhayati, Riska Amelia, Sri Wahyuni, Neneng, Dwiyantri dan Tanti Meliani yang memberikan dukungan dan semangat.
- (10) Keluarga Baitunna Jannatuna : Mbak Desnida Sari, Mbak Berta Braja, Mbak Rahmawati Sadiyah, Mba Nur Chasisa, Adik Nia, Widya, Duta, Riska Munjia, Sarifah Aini, Diana Novita Sari, Desti Silviana, dan Mbak Yunita yang memberikan dukungan dan semangat.
- (11) Teman-teman di BEM U KBM Unila: Ahmad Nur Hidayat, Salma Faizah, Linda Kurniawati, Ika Putriana, Diah Rizky, Sinta Dewi, Khoirul Anwar, Abdussalam, Ayu Taqiya, Ninasyta, Nikmaturosida, Rahmad satria, Agus Setyawan, Havez Annamir, Dina Pertiwi, Bayu Saputra, Dewi Citra, Desi Rosdiana, Ari Krisna, Risiko Apriandi, yang memberikan doa dan semangat.
- (12) Keluarga Kementerian Eksternal Hebat : Shelvi, Vindilia, Novilia, Tri Doni, Mat Ali, Eewi Maulida, Riana, Tiara, Shifa, Alek, Reny, Laily yang memberikan doa dan semangat
- (13) Ririn Aristiyani, Ririn Pamuncak, Mita Lestari, Ayu Okriani, Siti Maryani, , Annisa Ghaisani, Imung, Yani, Shelvi, Mba Febi, Yohilda, Zupika Audina,

Meiska, Devi, Lita, Susi, Desi, Irfan, made, Riki, Rio, Jule, Bagus, Hari,
Ramon, Yolanda, Yurlia dan seluruh rekan-rekan Agribisnis angkatan 2012
lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

(14)Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan penyelesaian
penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2017

Eka Prianti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Kemiskinan.....	12
2. Pangan	17
3. Ketahanan dan Kerawanan Pangan	19
4. Pengeluaran Rumah Tangga.....	20
5. Teori Konsumsi	24
6. Pola Konsumsi Rumah Tangga	25
7. Kebijakan Beras Miskin	27
8. Voucher/kartupangan.....	31
9. Uji Beda.....	31
10. Crosstab	32
11. Kajian Terdahulu	33
B. Kerangka Pemikiran	36
C. Hipotesis.....	40
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Definisi Operasional.....	41
C. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Sampling.....	43
D. Metode Analisis Data	45
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran umum Kota Bandar Lampung	51
B. Kecamatan Panjang	54

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identifikasi Responden	57
B. Hasil dan Pembahasan	63
1. Pengaruh subsidi Raskin terhadap pola pengeluaran rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	63
2. Faktor faktor yang mempengaruhi respon rumah tangga terhadap voucher/Kartu pangan pengganti program Raskin	77
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Garis Kemiskinan, jumlah dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung, 2006-2015	2
Tabel 2. Data jumlah keluarga pra sejahtera menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung.....	4
Tabel 3. Data RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) Program RASKIN 2015 di Kecamatan Panjang	44
Tabel 4. Tingkat pekerjaan utama masyarakat Panjang Tahun 2015.....	55
Tabel 5. Pentahapan keluarga sejahtera menurut kelurahan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	56
Tabel 6. Usia dan pendidikan responden di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	58
Tabel 7. Jumlah tanggungan keluarga responden di Kecamatan Panjang tahun 2016.....	60
Tabel 8. Tingkat pendapatan responden di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tahun 2016.....	61
Tabel 9. Jumlah subsidi raskin yang diterima responden di Kota Bandar Lampung tahun 2016	62
Tabel 10. Rata-rata pengeluaran pangan per bulan rumah tangga sebelum-sesudah menerima Raskin	67
Tabel 11. Rata-rata pengeluaran pangan per bulan rumah tangga sebelum-sesudah menerima Raskin	71
Tabel 12. Hasil uji beda rata-rata pengeluaran konsumsi pangan sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin.....	74
Tabel 13. Hasil uji beda rata-rata pengeluaran non pangan rumah Tangga sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin.....	75
Tabel 14. Tabulasi silang antara usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan.....	79

Tabel 15. Hasil uji chi-square antara variabel usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan.....	80
Tabel 16. Tabulasi silang antara jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan.....	81
Tabel 17. Hasil uji chi-square antara jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan	82
Tabel 18. Identitas responden Kota Bandar Lampung.....	89
Tabel 19. Rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga Kota Bandar Lampung sebelum menerima raskin	96
Tabel 20. Rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga Kota Bandar Lampung sebelum menerima raskin	102
Tabel 21. Pengeluaran pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung sesudah menerima subsidi raskin	114
Tabel 22. Rata-rata pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung sebelum menerima subsidi raskin	126
Tabel 23. Rata-rata pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung sesudah menerima subsidi raskin	138
Tabel 24. Respon rumah tangga di Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan kartu pangan	150
Tabel 25. Hasil uji beda rata-rata pengeluaran konsumsi pangan Rumah tangga.....	155
Tabel 26. Hasil uji beda rata-rata pengeluarankonsumsi non pangan Rumah tangga.....	158
Tabel 27. Hasil tabulasi silang antara variabel usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga terhadap kartu.....	157
Tabel 28. Hasil tabulasi silang antara jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan	159

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung.....	39
Gambar 2. Rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga sebelum dan Sesudah menerima subsidi raskin	70
Gambar 3. Rata-rata pengeluaran non pangan rumah tangga sebelum dan Sesudah menerima subsidi raskin	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan kebijakan – kebijakan yang dibuat selalu berorientasi pada suatu pembangunan negara. Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD tahun 1945.

Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat guna menyelesaikan masalah klasik pembangunan yaitu kemiskinan.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (Sunarti 2006). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan akan sangat mempengaruhi ketahanan pangan suatu bangsa.

Kebutuhan konsumsi beras rata – rata per hari penduduk Indonesia mencapai 0,31 kg atau setara dengan 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Angka yang sangat tinggi hampir dua kali lipatnya rata – rata penduduk

dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret Tahun 2013 tercatat sebesar 73,52% .

Definisi ketahanan pangan sebagaimana menurut PP No. 17 Tahun 2015 adalah Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 memberikan informasi tentang tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,53 %.

Angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Lampung yang masih di atas 14%. Lebih jelas tentang perkembangan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, jumlah dan presentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung, 2007-2016

<i>Tahun Year</i>	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2007	157.052	1.662	22,19
2008	172.332	1.592	20,98
2009	188.812	1.558	20,22
2010	202.414	1.480	18,94
2011	234.073	1.308	16,93
2012	248.645	1.264	16,18
2013	276.759	1.175	14,86
2014	306.600	1.143	14,28
2015	337.996	1.163	14,35
2016	364.922	1.169	14,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2017

Berdasarkan hasil survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, pada Maret 2016 ini, angka kemiskinan Provinsi Lampung kembali mengalami kenaikan. Diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 14,35 persen atau sebanyak 1.163ribu jiwa. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2014 masih tinggi yaitu 14,28 persen atau 1.143 ribu jiwa, dengan kata lain selama periode tahun 2014-2016 telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 26 ribu jiwa. Angka kemiskinan Lampung September 2016 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional.

Kenaikan tingkat kemiskinan lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang bertambah 0,26 persen (9,1 ribu jiwa), sedangkan di daerah perdesaan hanya mengalami kenaikan 0,11 persen (10,5 ribu jiwa). Artinya, pada periode ini penurunan tingkat kesejahteraan penduduk miskin lebih cepat terjadi di perkotaan dibanding di perdesaan.

Kehidupan di perkotaan seolah-olah memberikan suasana menjanjikan bagi setiap urban yang silau dengan corak kehidupan glamour, penuh kemewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum memadai, berbagai gedung menjulang tinggi dan masyarakat bergaya hidup “modern”. Semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal di balik itu ternyata beberapa studi yang dilakukan Santoso (1991) menemukan bahwa di sisi lain kehidupan kota yang menunjukkan kemajuan terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan, kemiskinan yang terkonsentrasi pada pemukiman kumuh. Kemiskinan masyarakat di perkotaan merupakan realitas sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Lampung juga masih memiliki tantangan dalam memerangi kemiskinan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2015, di ketahui bahwa tingkat kemiskinan di Bandar Lampung masih tinggi, yaitu 10,85 persen dan masih memiliki 58.486 keluarga pra sejahtera.

Tabel 2. Data jumlah keluarga pra sejahtera menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Keluarga Pra sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera I	Keluarga PraSejahtera II
Bumi Waras	4.123	3.039	2.422
Enggal	1.233	1.701	1.320
Kedamaian	2.945	3.167	2.717
Kedaton	2.759	2.264	2.687
Kemiling	2.950	5.070	4.842
Labuhan Ratu	1.898	3.396	2.749
Langkapura	2.415	1.270	1.678
Panjang	5.045	3.587	3.443
Rajabasa	1.613	2.870	2.574
Sukarame	2.823	1.060	3.041
Sukabumi	3209	2731	3029
Tanjung Karang Pusat	2.983	3.090	3.454
Tanjung Karang Barat	4.944	2.363	2.807
Tanjung Karang Timur	2.348	2.122	17.82
Tanjung senang	4.117	2.476	2.797
Teluk Betung Selatan	3.635	2.103	1.799
Teluk Betung Utara	2.495	2.275	2.945
Teluk betung barat	2.786	1.500	1.400
Teluk Betung Timur	4.273	2.496	2.418
Wayhalim	3.591	3.078	2.437

Sumber: BPS Bandar Lampung tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Panjang merupakan daerah dengan jumlah keluarga pra sejahtera paling banyak yaitu 5.045 keluarga. Panjang adalah salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung

yang memiliki 8 kelurahan yaitu Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Karang Maritin, Way Lunik, Ketapang dan Ketapang Kuala. Dari 8 desa tersebut, kelurahan Way Lunik merupakan desa yang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera paling banyak yaitu 1.104 dari total jumlah 1.967 rumah tangga.

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan dua pilihan dalam membelanjakan pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Besarnya beban pengeluaran disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah inflasi.

Berdasarkan hasil pemantauan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, tingkat inflasi di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan. Inflasi menjadi naik karena adanya perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,38 di bulan Januari menjadi 129,13 pada bulan Februari. Terjadinya inflasi disebabkan oleh naiknya harga pada beberapa komoditi terutama pada bahan makanan subkelompok bumbu-bumbuan, kacang-kacangan, daging, sayur mayur, di bahan makanan jadi adanya kelompok makanan minuman jadi, Rokok dan Tembakau dan di perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga di transportasi, komunikasi & jasa keuangan. Kondisi tersebut tentu akan memperburuk keadaan ekonomi kelompok keluarga pra sejahtera di Kota

Bandar Lampung karena harus menanggung beban pengeluaran yang lebih besar.

Pola pengeluaran rumah tangga secara umum dibedakan atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Rumah tangga yang memiliki pola pengeluaran yang lebih besar untuk pangan mengindikasikan rumah tangga tersebut adalah rumah tangga miskin (Triana, 2011). Pola pengeluaran pangan rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan dan kecerdasan serta produktivitas rumah tangga (Rachman, 2004).

Penyediaan pangan, terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau tetap merupakan prioritas utama pembangunan, oleh karena itu pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam hal ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu paket kebijakan ekonomi perberasan nasional dalam program jaminan ketersediaan pangan bagi konsumen rawan pangan adalah menetapkan pendistribusian/bantuan pangan bagi kelompok miskin (kebijakan raskin).

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) adalah program subsidi beras yang dilaksanakan secara nasional, lintas sektoral, baik secara horizontal maupun vertikal. Tujuan program ini adalah membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar terhadap pangan serta meningkatkan ketahanan pangan. Dengan adanya program ini, diharapkan kelompok masyarakat

berpendapatan rendah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan lainnya (TNP2K, 2015).

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat digambarkan dengan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan dua pilihan dalam membelanjakan pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BKP, 2010). Pola pengeluaran rumah tangga secara umum dibedakan atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Rumah tangga yang memiliki pola pengeluaran yang lebih besar untuk pangan

mengindikasikan rumah tangga tersebut adalah rumah tangga miskin (Triana, 2011).

Pola pengeluaran dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh pendapatan dan perubahan harga. Menurut teori Engel, pendapatan yang meningkat berarti daya beli juga meningkat sehingga mempengaruhi perubahan pola konsumsi baik konsumsi pangan maupun non pangan (Triana, 2011). Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin (Raskin).

Koutsoyianis (1975) berpendapat subsidi bahan pangan kepada penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi. Kriteria kemiskinan penduduk pedesaan dan perkotaan diukur berdasarkan konsumsi pangan (Sayogya, 2004).

Subsidi Raskin diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Sasaran raskin adalah terbantunya dan terbukanya akses pangan keluarga miskin dengan bahan pangan pokok (Beras), pada tingkat harga di tempat dan jumlah yang telah ditentukan dimana setiap kepala keluarga(KK).

Dengan dalih ketahanan pangan dan kesejahteraan, program Raskin hingga sekarang masih dilanjutkan, tak terkecuali di daerah Perkotaan yaitu Bandar Lampung. Namun, selama 13 tahun program Raskin berjalan, keadaan ekonomi penduduk Bandar Lampung belum juga membaik.

Pemerintah telah berupaya memperbaiki konsep dan pelaksanaan program raskin, namun banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas program tersebut. Evaluasi Raskin selama ini lebih banyak menyorot masalah efektivitas pelaksanaan program seperti pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Padahal, Efektivitas program tidak hanya dievaluasi dalam jangka pendek melalui ketepatan sasaran program semata namun juga harus memperhatikan pencapaian tujuan program yaitu peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota bandar Lampung. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung.

2. Implementasi program Raskin yang kurang efektif

Saat pertama kali dicetuskan, program raskin disebut sebagai operasi pasar khusus (OPK) beras. Program ini merupakan bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah pada 1998. OPK menjadi instrumen pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin, yang saat itu terkena atau berpotensi terkena imbas krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah nama menjadi raskin. Perubahan ini juga menjadi titik awal

pergeseran tujuan program. Raskin menjadi program bantuan pangan wajib sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Dalam perjalanannya, raskin mengalami pasang-surut. Di berbagai forum dan media sudah berkali-kali muncul isu bahwa raskin akan dihapus. Bahkan Bank Dunia telah secara khusus mengkajinya pada awal 2014. Salah satu alasan yang sering digunakan adalah banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan. Namun setidaknya masih ada kelompok yang melihat manfaat dari program ini, dan memiliki argumen yang kuat untuk mempertahankan dan tidak menghapus program raskin.

Saat ini, pemerintah telah memperbaiki kebijakan raskin dengan sistem baru yaitu Voucher/kartu pangan. Hal ini dilatarbelakangi permasalahan penyaluran raskin yang tak tepat sasaran, baik secara kuantitas, kualitas, dan waktu. Rencana perubahan program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) menjadi bantuan pangan dengan sistem kartu/voucher telah diluncurkan pada awal tahun 2017 dan akan di uji coba pada 44 kota termasuk kota Bandar Lampung. Warga tak akan lagi menerima beras miskin (Raskin). Sebagai gantinya, mereka menerima uang non tunai per bulan dalam bentuk kartu. Saldo yang tertera dalam kartu tersebut nantinya akan ditukarkan dengan komoditas beras dan bahan pokok lainnya dengan kualitas yang lebih baik di beberapa titik bagi wilayah masing-masing.

Rumah tangga sebagai penerima manfaat dari kebijakan memiliki hak untuk berpendapat mengenai program voucher pangan. Respon warga terhadap rencana kebijakan voucher pangan pengganti raskin tentu akan berpengaruh

terhadap keberhasilan program disuatu wilayah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara usia, pendidikan, jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga pra sejahtera di Kota Bandar Lampung,
2. Mengetahui hubungan antara usia, pendidikan, jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan voucher/kartu pangan pengganti program raskin.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan dan program tentang raskin di masa yang akan datang bagi pihak-pihak yang berwenang seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemiskinan

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara - negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosialmaupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap), (Harahap, 2006).

Definisi kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, adalah kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. BPS mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (dalam Noviar, 2013) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Menurut Ted K. Bradshaw (2005), kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Kemiskinan disebabkan adanya kekurangan dari tiap individu.

- b. Kemiskinan disebabkan oleh adanya “budaya miskin” di daerah tempat tinggal.
- c. Kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial atau diskriminasi.
- D. Kemiskinan dikarenakan oleh faktor letak geografis.
- E. Kemiskinan terjadi akibat kumulatif dari keempat alasan tersebut.

Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002) mengemukakan bahwa masyarakat yang miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal; (1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupannya; (2) melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*); (3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*); (4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*); dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b) Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

c) Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing

7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
10. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
11. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
13. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
14. Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

d) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

2. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi (Syafa'at dan Simatupang, 2006).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman (Saparinto dan Hidayati, 2006).

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiapwarga masyarakat, sehingga pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat (Wirakartakusumah, 2001)

Pangan memiliki pengertian yang luas, mulai dari pangan esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain) serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya. Jadi pangan tidak hanya berarti pangan pokok dan jelas tidak hanya berarti beras, melainkan pangan yang terkait dengan berbagai hal lain (Krisnamurti, 2003).

Salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pangan, terutama beras adalah konsumen. Beras masih menjadi sumber pangan pokok bagi sebagian terbesar penduduk Indonesia. Partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah adalah di atas besaran 90 persen.

Kepentingan konsumen perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan di bidang perberasan (Harianto, 2001).

3. Ketahanan Pangan dan Rawan Pangan

Pengertian Ketahanan Pangan menurut PP No. 17 Tahun 2015 adalah Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Rawan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan berakvitas dengan baik. Rawan pangan dapat dibedakan 2 jenis yaitu : (a) rawan pangan kronis, yaitu ketidak cukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian di pasar atau melalui produksi sendiri. Kondisi ini berakar pada kemiskinan dan (b) rawan pangan transien/transistori, yaitu penurunan akses terhadap pangan yang dibutuhkan rumah tangga secara kontemporer. Hal ini disebabkan adanya bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak, sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga pangan, produksi, atau pendapatan (Baliwati, 2004).

4. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Tingkat pengeluaran terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan/ permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok tersebut pada dasarnya berbeda- beda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadipergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BKP dalam Simbolon, 2011).

Badan Pusat Statistik (2007) menyatakan pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan. Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan (*saving*) atau diinvestasikan (BKP, 2010). Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi penduduk),

sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk (BKP, 2010).

Dumairy (2004) mengatakan konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa. Pembelanjaan atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan memenuhi kebutuhan dinamakan barang konsumsi.

Badan Pusat Statistik(2007) mendefinisikan pola konsumsi rumah tangga sebagai proporsi pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan non Pangan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh

lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan (BPS, 2011).

Secara umum kebutuhan konsumsi/pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan, dimana kebutuhan keduanya berbeda. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan, sehingga dapat dilihat pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Namun demikian, seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan (Sugiarto,2008).

James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar, sedangkan *saving* akan bertambah besar dengan pesatnya. Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah dilalui, maka tambahan pendapatan akan banyak menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk

konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya *saving* tidak begitu cepat. (Reksoprayitno, 2000).

Persentase pengeluaran pangan pada tingkat rumah tangga adalah rasio pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Perhitungan pangsa atau persentase pengeluaran pangan pada tingkat rumah tangga menggunakan formula sebagai berikut :

$$PF = \frac{PP}{TP}$$

Dimana :

PF = Pangsa atau persentase pengeluaran pangan (%)

PP = Pengeluaran untuk pangan rumah tangga (Rp/bulan)

TP = Total pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan)

(Sinaga dan Nyak Ilham, 2002)

5. Teori Konsumsi

Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Lebih lanjut Keynes mengatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan (Waluyo, 2002)

Konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan. Penghasilan keluarga atau uang masuk sebagian besar dibelanjakan lagi, untuk membeli yang diperlukan untuk hidup. Dalam ilmu ekonomi

dikatakan: dibelanjakan untuk dikonsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makanan, tetapi mencakup pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gilarso, 1992).

Di dalam teorinya, Duesenberry menggunakan dua asumsi yang digunakan untuk mengamati faktor- faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi seseorang.

- a) Selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah Interdependen
Artinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya (tetangga). Jadi faktor lingkungan dapat berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi.
- b) Pengeluaran konsumsi adalah Irreversible. Artinya, pola pengeluaran pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Di dalam hal ini dikatakan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan relatif. Pendapatan relatif disini adalah merupakan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai oleh seseorang. Sebagai misal, apabila pendapatan seseorang mengalami kenaikan maka secara otomatis konsumsi juga mengalami kenaikan dengan proporsi tertentu, dan sebaliknya bila pendapatan mengalami penurunan maka akan diikuti juga oleh penurunan konsumsinya. Akan tetapi, proporsi penurunannya lebih kecil dibandingkan proporsi akibat kenaikan pendapatan. (Waluyo, 2002)

6. Pola Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi menurut Mankiw (2000) “Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (Non Durable Goods) pertama adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian, Kedua adalah barang tahan lama (Durable Goods) adalah barang yang dimiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, Ketiga adalah jasa (Services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter”

Menurut Sengul dan Tuncer 2005 dalam Dwi Dianis (2014), Pola konsumsi dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Pola konsumsi rumah tangga miskin sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu adanya perubahan harga dan pendapatan. Teorema Engel menyatakan pangsa pengeluaran pangan akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat berarti daya beli juga meningkat sehingga mempengaruhi perubahan pola konsumsi baik konsumsi pangan maupun nonpangan. Peningkatan pendapatan memberikan kesempatan besar untuk asupan makanan yang lebih banyak dan kualitas makanan yang lebih baik. Dari hasil penelitian di 114 negara di dunia didapatkan bahwa negara miskin menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan seperti makanan, minuman dan tembakau serta lebih responsif terhadap perubahan harga dan pendapatan. Penyesuaian besar terhadap pola

konsumsi pangan dilakukan ketika terjadi perubahan harga dan pendapatan,

Martianto dan Ariani (2004) menyatakan bahwa tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap jenis dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsinya. Sesuai dengan hukum Bennet, semakin tinggi pendapatan maka kualitas bahan pangan yang dikonsumsipun semakin baik yang tercermin dari perubahan pembelian bahan pangan yang harganya murah menjadi bahan panganyang harganya lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh seseorang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebiasaan makan yang tercermin dari pengurangan frekuensi makan dari 3 kali menjadi 2 kali dalam sehari. Selain itu, masyarakat berpendapatan rendah juga akan mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan jenis yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang seperti mengkonsumsi tahu dan tempe sebagai pengganti daging.

Menurut Rahardja dkk (2005) semakin tinggi pendidikan seseorang pengeluaran konsumsinya juga akan semakin tinggi, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan hubungannya positif. Pada saat seseorang atau keluarga memiliki pendidikan yang tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak. Kondisi ini disebabkan karena yang harus mereka penuhi hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, tetapi juga kebutuhan informasi, pergaulan di masyarakat baik, dan kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya.

7. Kebijakan Beras Miskin (Raskin)

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal, Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998 untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu Program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Tujuan Program Raskin adalah untuk perlindungan sosial yaitu:

- a. Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras Rata-rata konsumsi Beras 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011) 9,5 kg/jiwa/bln. Kebutuhan beras/RTS (jika 4 jiwa/RTS) = 38 kg/RTS/bulan. Kontribusi Raskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan RTS/bulan, dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan $(15/38) \times 100\% = 39,5\%$.
- b. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jika diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan catatan harga makanan lain tidak berubah (P4S, Bappenas, 2013 dalam TNP2K).

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan

harga BBM. Pada awal tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan Nopember –Desember ke bulan Februari Maret dampak bencana alam yang melanda hampir di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2014.

Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh Kementerian/Lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS. Tetapi bagi pemerintah daerah yang mampu dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan Program Raskin yang meliputi Raskin Daerah untuk menambah jumlah RTS, subsidi Harga Tebus Raskin (HTR), pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Raskin (PKR) atau “Raskin for Work”, penyaluran Raskin melalui Warung Desa dan Pokmaskin. Demikian pula penyertaan perguruan tinggi dan LSM untuk kajian dan pemantauan pelaksanaan Raskin telah membuka ruang penilaian yang lebih independen.

8. Voucher/kartu pangan

Voucher adalah mekanisme baru untuk menyalurkan subsidi pangan pada masyarakat miskin lewat kartu elektronik. Rencananya, program tersebut akan mulai diuji coba pada awal 2017. Sederhananya, rumah tangga penerima manfaat raskin menerima hak mereka setiap bulan dengan hitungan kilogram. Tapi penerima voucher harus menghitung harga beras. Penerima bantuan raskin adalah rumah tangga yang mempunyai kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial). Pemerintah menyalurkan sejumlah uang tertentu (Rp 110.000) per bulan ke rekening keluarga sasaran untuk menukarnya dengan 15 kilogram beras raskin dengan harga tebus Rp. 1.600/Kg di Titik Bagi (TNP2K, 2016) Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, keuntungan voucher pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada masyarakat miskin
3. Memberikan akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin
4. Mengefektifkan anggaran

9. Uji Beda

Uji-t dua sampel independen (*Independent Sampel t-Test*) digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (*mean*) dari dua sampel yang idenpenden dengan asumsi data terdistribusi normal. Menurut

Sugiyono (2005), untuk melakukan uji beda terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut ini memberikan pedoman penggunaannya :

- a) Bila jumlah sampel $n_1 = n_2$, dan varians homogen ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk *Separated* maupun *Pooled* varians. Untuk melihat harga t-tabel digunakan $dk = n_1 + n_2 - 2$.
- b) Bila $n_1 \neq n_2$, varians homogen ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$), dapat digunakan dengan *Pooled* varians. Derajat kebebasan (dk) = $n_1 + n_2 - 2$.
- c) Bila $n_1 \neq n_2$, varians tidak homogen ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$), dapat digunakan dengan *Separated* dan *Pooled* varians. Dengan $dk = n_1 - 1$ atau $n_2 - 1$. jadi dk bukan $n_1 + n_2 - 2$.
- d) Bila $n_1 \neq n_2$ dan varians tidak homogen ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$). Untuk ini digunakan t-test dengan *Separated* varians. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk ($n_1 - 1$) dan \underline{dk} ($n_2 - 1$) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil.

10. Pengertian Metode Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab*)

Tabulasi silang (Indriatno, dkk.,;1998) merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval serta kombinasi diantaranya. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung banyaknya kasus yang mempunyai kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel dan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya.

Metode analisis silang (*Crosstab/Crossclasifed*) memiliki beberapa metode pendekatan yang berbeda dan menggunakan uji statistik yang berbeda pula, bergantung pada banyaknya variabel yang akan diidentifikasi hubungannya satu sama lain. Jika hanya menggunakan dua variabel maka dapat menggunakan metode kontigensi, metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam analisis tabulasi silang. Jika variabel yang hendak diuji jumlahnya lebih dari dua dapat menggunakan model yang disebut dengan Hirarchical Log Linier.

Tabulasi silang merupakan metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris.

Kegunaan Analisis Tabulasi Silang adalah dalam menyelesaikan permasalahan analisis data.

Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang, khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota, adalah :

1. Membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif, setelah melalui uji statistik.
2. Menentukan besarnya derajat asosiasi (hubungan kuat atau lemah)
3. Dapat menentukan variabel dependent (terikat) dan variabel independent (bebas) dari dua variable yang dianalisis.

Dilihat bahwa analisis silang akan sangat membantu perencanaan dalam menganalisis pada tahap selanjutnya, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis Tabulasi Silang berguna apabila data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk data kategori yang diperoleh dari survey primer.

11. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Heri Risal Bungkaes (2013) yang berjudul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik sederhana yaitu analisis *Chi-square* (Kai-kwadrat) dan analisis Koefisien Kontingensi.

Hasil penelitian Husnul Amaliyah (2011) yang berjudul Analisis Hubungan Proporsi pengeluaran Dan Konsumsi Pangan Dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Di Kabupaten Klaten, program raskin dianggap mampu meningkatkan konsumsi beras, ikan, daging, telur, sayur, dan rokok. Simulasi 2 menunjukkan bahwa program pemerintah terkait pemberian BLT kepada rumah tangga miskin dianggap mampu meningkatkan konsumsi beras, ikan, daging, telur, sayur, dan rokok secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif. Metode pengambilan lokasi penelitiannya secara purposivesampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan.

Hasil penelitian Noviar Wicaksono tentang Peran Kebijakan Raskin Terhadap Alokasi Pengeluaran Rumah tangga Petani Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan: Studikasuk Di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga 2013 menunjukkan bahwa persentase pengeluaran pangan sebelum menerima Raskin yaitu sebesar 68 persen dan sedangkan setelah menerima Raskin yaitu sebesar 67,87 persen. Besarnya persentase tersebut lebih besar dari 60 persen sehingga tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani dikategorikan sebagai rumah tangga rawan pangan. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, persentase pengeluaran pangan, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil Penelitian Friska Juliana Simbolon yang berjudul analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Medan Tuntungan 2011, diperoleh bahwa rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan termasuk rumah tangga rawan pangan karena sebanyak 77,5 % sampel rumah tangga miskin memiliki besar pangsa atau persentase pengeluaran pangan yang tinggi. Secara parsial faktor- faktor yang memiliki pengaruh yang nyata dan positif terhadap pengeluaran pangan rumah tangga adalah: pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, sedangkan yang memiliki

pengaruh yang nyata dan negatif terhadap pengeluaran pangan rumah tangga adalah: jumlah subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin) yang diterima.

Penelitian Sasongko tentang Pengaruh Raskin Terhadap Pengeluaran Konsumsi Dan Sosial Ekonomi Serta Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Timur 2009 menggunakan rancangan studi menguji hipotesis kausal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Multistage Sampling. Subsidi beras untuk keluarga miskin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi di sampel wilayah budaya Mataraman dan sampel wilayah budaya Arek. Pada sampel wilayah budaya Madura, subsidi beras untuk keluarga miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi keluarga. Subsidi beras untuk keluarga miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keadaan sosial ekonomi keluarga di sampel wilayah budaya Mataraman. Berdasarkan Hasil penelitian Yigibalom (2014) tentang Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya Pelaksanaan program Raskin program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di beberapa Daerah selama ini masih banyak ditemukan berbagai penyimpanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Penelitian Triana tentang Pengaruh Kebijakan Subsidi Beras Miskin Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Pengeluaran Telekomunikasi Dan

Rokok Rumah Tangga Miskin Di Pulau Jawa 2011 menunjukkan bahwa Penurunan harga telekomunikasi, peningkatan harga rokok dan pemberian subsidi raskin meningkatkan permintaan komoditi pangan, rokok dan telekomunikasi namun menurunkan permintaan komoditi non pangan. Penurunan harga telekomunikasi, peningkatan harga rokok dan pemberian subsidi BLT meningkatkan permintaan untuk semua komoditi. Persentase perubahan permintaan terbesar adalah komoditi rokok dan telekomunikasi. Metode ekonometrika yang digunakan adalah model LA/AIDS yang mengacu pada model Deaton dan Muellbauer (1980a, 1980b) dengan melibatkan beberapa karakteristik sosial demografi.

Penelitian Zulfa Amalia tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan program Raskin di Kota Bandar Lampung 2013 menggunakan metode analisis efektivitas program raskin yang sesuai ketetapan pemerintah yaitu tepat : sasaran, jumlah, harga, kualitas, administrasi, dan waktu. Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya telah memenuhi kriteria berdasarkan Pedoman Umum raskin, yaitu: pelaksanaannya sesuai Pedoman Umum Raskin adalah tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat waktu, sedangkan tepat jumlah, pelaksanaannya tidak sesuai Pedoman Umum Raskin. Adanya penambahan raskin yang diberikan. Dari pedum sebesar 13Kg/RTM menjadi 15Kg/RTM.

B. Kerangka Pemikiran

Bandar Lampung sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Lampung masih memiliki tantangan dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara

lain melambatnya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2016, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Bandar Lampung masih tinggi, yaitu 14,29 persen dan masih memiliki 58.486 keluarga pra sejahtera.

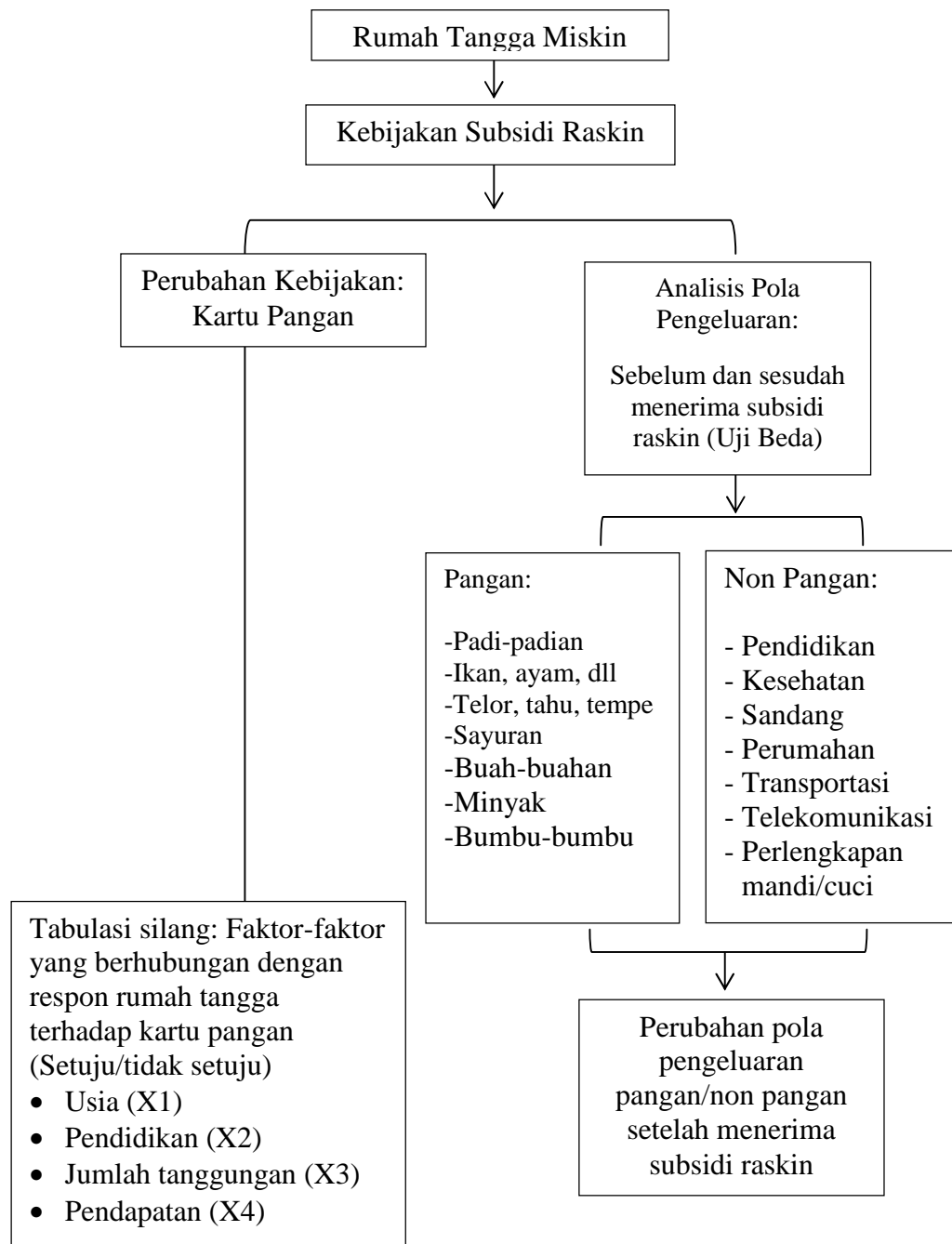
Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan dua pilihan dalam membelanjakan pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pola pengeluaran rumah tangga juga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Pola pengeluaran rumah tangga secara umum dibedakan atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan.

Pengeluaran pangan rumah tangga (pangan dan non pangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yaitu pendistribusian/bantuan pangan bagi kelompok miskin atau sering disebut Raskin (beras miskin). Pemberian raskin tersebut harapannya dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan dari pemerintah yaitu raskin dapat memperbaiki pola pengeluaran rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya saat ini kondisi ekonomi Bandar Lampung tak kunjung membaik, untuk itulah perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana seberapa besar peran raskin mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Selain itu pemberian subsidi raskin juga diduga dapat mempengaruhi

pola pengeluaran rumah tangga miskin baik perubahan pola pangan maupun non pangan.

Dalam perjalanannya, raskin mengalami pasang-surut. Dalam berbagai forum dan media sudah berkali-kali muncul isu bahwa raskin akan dihapus. Bahkan Bank Dunia telah secara khusus mengkajinya pada awal 2014. Salah satu alasan yang sering digunakan adalah banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan. pada tahun 2017, pemerintah telah memperbaiki kebijakan raskin dengan sistem baru yaitu Vaoucer/kartu pangan.

Rumah tangga sebagai penerima manfaat dari kebijakan memiliki hak untuk berpendapat mengenai program vaucher pangan. Respon warga terhadap rencana kebijakan vaucher pangan pengganti raskin tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan program disuatu wilayah. Maka dari itulah perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan respon rumah tagga terhadap kebijakan kartu pangan. Bagan alur dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Bagan alur peran kebijakan raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga sebelum dan sesudah menerima raskin berbeda nyata
2. Diduga secara bersama variabel usia (X1), pendidikan (X2), jumlah tanggungan keluarga(X3) dan pendapatan (X4) berhubungan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan voucher pangan pengganti raskin.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survai, yaitu jenis penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang dianggap sebagai populasi.

B. Definisi Operasional

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan umumnya tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari dikelola secara bersama-sama.

Pendidikan adalah tahapan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh oleh seseorang, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Total Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pengeluaran pangan dan non pangan, yang diukur dengan satuan rupiah per tahun (Rp/th)

Pengeluaran pangan adalah besarnya uang yang dikeluarkan dan barang yang dinilai dengan uang untuk konsumsi makanan semua anggota keluarga, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th)

Pengeluaran untuk non pangan rumah tangga adalah jumlah pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan nonpangan yang dibeli oleh rumah tangga, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) pada periode satu bulan.

Pengeluaran beras adalah sejumlah uang yang dikeluarkan responden untuk mengonsumsi beras. Pengeluaran dalam penelitian ini difokuskan pada pengeluaran untuk konsumsi beras. Pengeluaran untuk pangan beras diukur dalam satuan Rupiah per kapita per tahun.

Beras untuk keluarga miskin dalam penelitian ini adalah beras bersubsidi yang disalurkan pemerintah untuk keluarga miskin dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan pada keluarga miskin dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran konsumsi pangan (Ditjen PMD, 2004)

Pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga serta anak, yang dinyatakan dalam

satuan rupiah (Rp) pada periode waktu satu bulan.

Pendidikan adalah tahapan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh oleh seseorang, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Usia adalah satuan waktu yang mengukur lamanya waktu keberadaan seseorang hidup di dunia ini, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Jumlah subsidi Raskin yang diterima adalah jumlah beras subsidi yang diberikan pemerintah kepada setiap rumah tangga miskin untuk setiap bulannya, yang dinyatakan dalam satuan kilogram.

Kartu pangan adalah mekanisme baru untuk menyalurkan subsidi pangan pada masyarakat miskin lewat kartu elektronik

C. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Sampling

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diambil adalah data primer yang merupakan data diambil secara langsung melalui kuesioner dan wawancara,

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2011).

Daftar pertanyaan tersebut diarahkan kepada responden terkait dengan alokasi pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah menerima raskin.

Data sekunder diperoleh dari dari laporan-laporan, publikasi, dan lembaga atau instansi terkait, seperti: Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, BPS Kota Bandar Lampung, dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga sasaran penerima manfaat program RASKIN 2015 di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Panjang merupakan daerah perkotaan paling miskin karena mempunyai jumlah keluarga prasejahtera paling banyak. Dengan pertimbangan itu maka kecamatan tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian.

Tabel 3. Data RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) Program RASKIN 2015 menurut kelurahan di Kecamatan Panjang

No	Kelurahan	Jumlah RTS-PM Program RASKIN
1.	Srengsem	478
2.	Panjang Selatan	580
3.	Panjang Utara	636
4.	Pidada	662
5.	Karang Maritim	744
6.	Way Lunik	1104
7.	Ketapang	823

Sumber: BULOG 2015

Terdapat 7 Kelurahan di Kecamatan Panjang, 2 Desa dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Way Lunik karena memiliki jumlah RTS PM Paling banyak dan desa Srengsem karena memiliki RTS PM paling sedikit.

Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Srengsem. Masing-masing sebanyak 1104 dan 478 RTS PM. Pengambilan data dilakukan mulai dari Bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*.

simple random sampling adalah metode untuk mengambil sampel secara acak sederhana. Dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan jumlah sampel mengacu pada Isaac dan Michael (dalam Sugiyono 2003), dengan rumus:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2+Z^2S^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah populasi

Z = Distribusi Z

S² = Varian sampel (5%=0,05)

d = Simpangan baku (5%=0,05)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 71 orang di Desa Way Lunik dan 66 orang di Desa Srengsem.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel, sistem pengambilan sampel dengan menggunakan tabel bilangan acak.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif.

1. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif

Untuk menjawab tujuan pertama, digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi berdasarkan data yang telah didapatkan melalui wawancara langsung/kuesioner yang disajikan dalam bentuk pernyataan responden atau tabel yang menggambarkan pola pengeluaran rumah tangga penerima raskin.

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang bermaksud membuat pencanderaan mengenai situasi atau kejadian, memberikan gambaran atau ringkasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena. Analisis tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan rumah tangga penerima raskin untuk mengetahui apakah subsidi raskin mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga dan bagaimanakah perubahan pola konsumsi yang terjadi baik pangan maupun non pangan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan yaitu tabel dan grafik. Selain itu data diterjemahkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian disusun dan ditarik kesimpulan.

Untuk menjawab tujuan pertama, analisis deskriptif kuantitatif dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan rumah tangga penerima raskin dengan melakukan perhitungan dari data yang didapat untuk mengetahui rata-rata pengeluaran sebelum dan sesudah menerima subsidi raskin. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka dan tabulasi sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya. Dengan demikian hasil olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Selain dilakukan analisis secara tabulasi, akan dilakukan juga uji beda untuk mengetahui secara statistik parametik apakah ada perbedaan konsumsi pangan maupun konsumsi non pangan rumah tangga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah menerima subsidi

raskin Sesuai dengan namanya, uji beda, maka uji ini dipergunakan untuk mencari perbedaan, baik antara dua sampel data atau antara beberapa sampel data. Sampel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sampel rata-rata pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi raskin (X_1) dan sampel rata-rata pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sesudah menerima raskin (X_2). Dengan Hipotesis sebagai berikut:

- a. $H_0 = X_1 = X_2$, Artinya tidak ada perbedaaan pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi raskin sesudah menerima subsidi raskin.
- b. $H_1 = X_1 \neq X_2$, Artinya ada perbedaaan pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi raskin sesudah menerima subsidi raskin.
- c. Kriteria : Tolak H_0 apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau Signifansi kurang dari 0,05

2. Respon Tangga Terhadap Rencana Kebijakan Voucher/Kartu Pangan Pengganti Raskin

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi respon tangga terhadap rencana kebijakan Voucher/Kartu Pangan Pengganti Raskin, dikatakan setuju atau tidak setuju, maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis tabulasi silang (Crosstab).

Tabulasi silang (Indriatno, dkk.,1998) merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval serta kombinasi

diantaranya. Tabulasi silang merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan variabel. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris dan dengan melihat nilai *chi-square*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu usia, pendidikan, jumlah tanggungan, dan pendapatan. Masing-masing 2 variabel saling berinteraksi lalu akan dikombinasikan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan (setuju/tidak setuju).

- a. Hubungan antara variabel usia dan pendidikan (kolom) dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan (baris) dengan interaksi variabel sebagai berikut:

Kolom A = responden usia muda, pendidikan rendah

Kolom B = responden usia muda, pendidikan tinggi

Kolom C = responden usia tua, pendidikan rendah

Kolom D = responden usia tua, pendidikan tinggi

- b. Hubungan antara variabel jumlah tanggungan dan pendapatan (kolom) dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan (baris) dengan interaksi variabel sebagai berikut:

Kolom E = responden jumlah tanggungan sedikit, pendapatan rendah

Kolom F = responden jumlah tanggungan sedikit, pendapatan tinggi

Kolom G = responden jumlah tanggungan banyak, pendapatan rendah

Kolom H = responden jumlah tanggungan banyak, pendapatan tinggi

Selanjutnya dilakukan *Crosstab* untuk menggambarkan keterkaitan hubungan dalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara karakteristik responden dengan pengambilan keputusan (setuju/tidak setuju) terhadap kebijakan kartu pangan dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara 2 karakteristik responden dengan respon terhadap kartu pangan.
- b. H_1 : ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara 2 karakteristik responden dengan respon terhadap kartu pangan.
- c. Kriteria: jika nilai *chi-square* $> 0,05$ maka H_0 diterima, tetapi bila nilai *chi-square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

1. Geografi

Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan pintu gerbang antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sebagai Ibukota provinsi, Bandar Lampung memiliki keuntungan karena setiap kegiatan baik dari pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian lebih cepat bertumbuh dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung.

Luas wilayah Kota Bandar Lampung sebesar 0,57 persen dari total luas wilayah provinsi Lampung, yaitu sebesar 197,22 km². Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah yang cukup kecil di bandingkan dengan kabupaten lainnya, di samping Kota Metro. Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 20 kecamatan yang terpecah menjadi 126 kelurahan. Berdasarkan topografi, 28 persen kelurahan merupakan daerah berbukit sedangkan 72 persen merupakan daerah datar. Selain berdasarkan topografi, berdasarkan letak geografisnya terdapat 13 persen atau sebanyak 17 kelurahan merupakan

daerah pantai dan 109 kelurahan merupakan daerah bukan pantai.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ - $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ - $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Bandar Lampung adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

2. Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 –700 meter diatas permukaan laut dengan empat karakteristik topografi yang dimiliki, yaitu:

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perbukitan, seperti Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing,

dan Gunung Kapuk. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah. Penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai macam suku. Jumlah penduduk yang berada di setiap kecamatan di Bandar Lampung juga beraneka ragam sesuai dengan besarnya luas wilayah setiap kecamatan dan pertumbuhan yang secara alami terjadi baik kelahiran maupun kematian serta perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 adalah 1.167.101 jiwa (BPS, 2015).

3. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, Kota Bandar Lampung mengalami pemekaran pada kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan serta pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan. Pemekaran ini tentunya berdampak pada peningkatan jumlah aparatur Negara yang melayani rakyat. Secara umum, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebanyak 11.622 orang, mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen dibanding tahun 2013. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah PNS di lingkungan pemerintah kota bandar Lampung baik PNS laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan komposisi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, tahun 2015 jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak 1,89 kali lipat

jumlah PNS yang berjenis kelamin laki-laki. Bahkan apabila dirinci menurut golongan proporsi PNS berjenis kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan proporsi PNS berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan, PNS Bandar Lampung telah melalui pendidikan yang cukup tinggi. Sekitar 65 persen PNS Bandar Lampung berpendidikan sarjana dan diploma bahkan sekitar 5 persen PNS telah meluluskan program S2 dan S3.

B. Kecamatan Panjang

Secara geografis Kecamatan Panjang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung di sebelah selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras. Kecamatan Panjang memiliki luas wilayah sebesar 17,90 km².

Panjang termasuk kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung yang memiliki luas terbesar ketiga setelah Kecamatan Sukabumi. Kecamatan Panjang terbagi dalam 8 kelurahan yaitu Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Karang Maritim, Way Lunik, Ketapang dan Ketapang Kuala.

Kelurahan terluas di Kecamatan Panjang adalah Srengsem sebesar 5,56 km² (31,06 persen dari total luas Kecamatan Panjang), diikuti Kelurahan Pidada sebesar 3,18 km² (17,77 persen). Sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Karang Maritim sebesar 1,05 km² atau 5,87 persen. Panjang berada pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan laut, secara topografis sebagian daerahnya adalah dataran rendah atau pantai dan

sebagian merupakan perbukitan.

Pemerintah Kecamatan Panjang dibentuk pada tahun 1976. Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Panjang berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan. Secara administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994, Kecamatan Panjang terbagi menjadi 7 Kelurahan. Pada tahun 2011, Kecamatan Panjang tidak mengalami penambahan jumlah kelurahan dan lingkungan dari tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Kecamatan Panjang terbagi menjadi 8 Kelurahan. Jumlah lingkungan di Kecamatan Panjang adalah 20 lingkungan. Sedangkan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panjang tahun 2012 menjadi 227. Pada tahun 2015, kecamatan panjang tidak mengalami penambahan jumlah kelurahan dan lingkungan dari tahun 2014.

Tabel 4. Tingkat Pekerjaan Utama Masyarakat Panjang Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	16.681
2.	Dagang	12.133
3.	Tukang	1.874
4.	PNS	1.646
5.	Tani	1.281
6.	Pensiunan	760
7.	TNI/Polri	222
8.	Lainnya	21.297
	Jumlah	55.894

Sumber: Kecamatan Panjang Dalam Angka, 2016

Menurut jenis pekerjaan banyaknya penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar tanpa klasifikasi sebesar 21.297 orang. Buruh menempati peringkat kedua sebanyak 16.681 orang, Pedagang menempati posisi ketiga sebesar 12.133 orang. TNI/Polri menempati urutan terakhir sebesar 222 orang. Hal ini menunjukkan dominasi pekerja pelabuhan di Panjang yang cukup tinggi Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya partisipasi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Panjang.

Tabel 5. Pentahapan keluarga sejahtera menurut kelurahan d Kecamatan Panjang

No.	Kelurahan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga sejahtera III	Keluarga sejahtera III plus
1.	Srengsem	487	401	500	416	73
2.	Panjang Sel.	580	733	737	632	129
3.	Panjang Ut.	636	801	554	474	335
4.	Pidada	662	724	859	681	106
5.	K. Maritim	744	331	520	420	91
6.	Way Lunik	1104	535	151	156	21
7.	Ketapang	501	46	77	73	2
8.	K. Kuala	331	16	55	49	2
	Jumlah	3685	2103	1799	1035	189

Berdasarkan table 5, Desa Way Lunik merupakan desa dengan penduduk prasejahtera paling banyak yaitu sebesar 1104 Keluarga sedangkan desa dengan jumlah prasejahtera paling sedikit adalah desa Srengsem yaitu sejumlah 487 keluarga. Angka tersebut sesuai dengan jumlah penduduk yang menerima subsidi raskin.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran subsidi raskin terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:
 - a) Terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah menerima subsidi raskin.
 - b) Terjadi pengurangan beban pengeluaran padi-padian rumah tangga setelah menerima subsidi raskin yaitu sebesar 2,57 %.
 - c) Terjadi peningkatan konsumsi sumber protein hewani (2%), sumber protein nabati (0,32%) dan buah-buahan (1%) rumah tangga di Kota Bandar Lampung setelah menerima subsidi raskin.
 - d) Pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung tidak banyak tidak mengalami perubahan setelah menerima raskin, seperti kebutuhan kesehatan, sandang, perumahan dan telekomunikasi yang hanya meningkat kurang dari 1%.
2. Variabel jumlah tanggungan dan pendapatan berhubungan dengan respon rumah tangga di Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan kartu pangan, sedangkan usia dan pendidikan responden tidak..

B. Saran

Pemerintah perlu menindaklanjuti temuan-temuan tentang banyaknya program raskin yang kurang tepat sasaran sehingga dapat mengatasi masalah *inclusion error* (warga yang masuk dalam kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan) dan *exclusion error* (warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan)

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2015. *Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2015*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Dwi Widianis. 2014. *Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal. IPB. Bogor.
- BaPS. 2015. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun, (berbagai tahun penerbitan)*. BPS Kota Bandar Lampung
- Bulog. 2012. *Daftar Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Raskin 2015*. Bulog. Lampung
- Dumairy. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Kanisius. Yogyakarta.
- Junaedi. 2005. *Dinamika pola konsumsi telur di Indonesia: suatu analisis data Susenas* [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Krishnamurti, B. 2003. *Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikerl Th2. April 2003.
- Mankiw, N. Greorgy. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Alih Bahasa : Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga
- Martianto D, Ariani M. 2004. Analisis Perubahan Konsumsi dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dalam Dekade Terakhir. Dalam Soekirman et al., editor. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII “Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi”; Jakarta 17-19 Mei 2004. Jakarta: LIPI
- Rachman, H. P. S. dan Supriyati. 2004. *Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Kasus Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan*. Agro-Ekonomika (1).
- Raharja, Pratama dan Mandala Manurung. 2005. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Reksoprayitno. 2000. *Ekonomi Makro (Pengantar Analisis Pendapatan Nasional)*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua. Liberty. Yogyakarta.

- Saparinto C dan Hidayati D. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Sayogyo. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Simbolon, F. J. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Medan Tuntungan. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sinaga dan Nyak Ilham. 2002. *Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Indikator Komposit Ketahanan Pangan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Sugiarto. 2008. *Metode Statistika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti E. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Naskah Akademis. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 116 hal
- Syafa'at, N dan P. Simatupang, 2006. *Kebijakan Pamantafan Ketahanan Pangan Nasional ke Depan*. Majalah Pangan 15 (47): 24-43.
- Sugiarto. 2003. *Teknik Sampling*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2015. *Tantangan Meningkatkan Efektivitas Program Raskin*. Jakarta Pusat.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2014. *Upaya Meningkatkan Ketepatan Sasaran Dan Jumlah Beras Yang Diterima Rts-Pm Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Triana, R. A. L. 2011. *Pengaruh Kebijakan Subsidi Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Pengeluaran Telekomunikasi dan Rokok Rumah Tangga Miskin di Pulau Jawa*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Waluyo, D.E. 2002. *Teori Ekonomi Makro Edisi Revisi*. UMM Press. Malang
- Wicaksono N. 2013. Peran Kebijakan Raskin Terhadap Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Petani dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalinggo. *Tesis*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

Wirakartakusumah. 2001. *Pelabelan Pangan. Di dalam: Hardiansyah, AtmojoSM.* Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan. Jakarta.